Oetoesan - Hindia:

Telaah Pemikiran Kebangsaan

Volume 3 No 2 Tahun 2021 Hlmn. 72 - 87

Artikel Masuk : 08 Desember 2021 | Artikel Diterima : 31 Desember 2021

Partisipasi Publik Dalam Transparansi Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Melalui Pemanfaatan Media Elektronik

M. Saiful Rohman¹

¹Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Jl. Nakula Sadewa, Kembangarum, Dukuh, Sidomukti, Salatiga 50722

msaifulrohman2017@gmail.com¹

Abstrak

Memperjuangkan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi kewajiban bagi lembaga penegak hukum tetapi juga seluruh masyarakat. Sebagai salah satu lembaga yang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Namun dalam hal kinerja KPK, masyarakat kurang mendapatkan informasi yang cukup. Sehingga publik kurang mengetahui akan sampai mana kasus tersebut berjalan. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya publik belum bisa sepenuhnya mengawal KPK. Semestinya setiap langkah KPK dalam menangani kasus harus diinformasikan pada masyarakat luas. Hal itu untuk mengetahui perkembangan tersangka setelah menjadi terdakwa dan divonis apakah ia mengajukan banding atau bahkan ditingkat kasasi hingga ingkrahnya suatu kasus. Untuk itu KPK perlu memberikan informasi agar publik dapat mengawal kasus yang ditanganinya yaitu dengan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana KPK untuk menyampaikan informasi pada publik.

Kata kunci : KPK, Media Elektronik dan Transparansi.

Abstrack

The fight againts corruption must be fought for, not only by law enforcement agencies but also the entire community. The corruption eradication commision as one of the institutions handling corruption in Indonesian has the duty and authority in invstigating, investigating and prosecuting. But in terms of the KPK's performance, the public lacks sufficent information. So the public does not know where the case will go. From this we can see that the public has not been able to fully oversee the KPK. Every step of the KPK in handling cases hould be informed to the wider community. This is to find out the development of the suspect after being accu sed and convicted whether he filed an appeal or even at the level of cassation to the extent of a cases. For this reason, the corruption eradication commision needs to provide information so that the public can oversee the case handled by the use of eletronic media as a means of the corruption radication commision to convey information to the public.

Keywords : KPK, Electronic Media and Transparancy

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Negara merupakan organisasi yang mempunyai sebuah wilayah kekuasaan dan secara sah memaksa untuk ditaati oleh semua golongan yang ada didalam wilayah dengan maksud tujuan hidup bersama. Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur akan cara, tugas dan batas kekuasaan yang digunakan untuk kehidupan bersama. Sedangkan pemerintah adalah sistem yang menjadi tanggung jawab sekelompok orang dalam menjalankan wewenang kekuasaan guna mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Materi hukum menjadi unsur yang sangat penting bagi pembangunan hukum di Indonesia. Sebab, hukum Indonesia menganut sistem *Civil Law*. Dengan pentingnya materi hukum itulah pembangunan hukum nasional akan terus dilakukan demi terwujudnya perundang-undangan yang memperhatikan kearifan lokal, revitalisasi hukum adat, hierarki dan reposisi yurisprudensi dalam hal pembaruan materi hukum nasional.

Dalam prakteknya, tugas pemerintahan berada dibawah kepemimpinan presiden sebagai pelaksana eksekutif. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi sumber hukum materil bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah serta negara mempunyai tanggung jawab terhadap publik untuk memberikan pelayanan yang efisien, cepat, nyaman dan murah.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik dapat terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia jika saja dibarengi dengan administrasi yang baik yaitu efektif dan demokratis. Dengan begitu, perlunya pemerintah untuk membentuk peraturan yang berkeadilan demi rasa adil pada semua warga negara tanpa terkecuali. Semua hal itu dapat terwujud jika konsep yang digunakan pemerintah adalah *Good government* yaitu kesepakatan akan aturan negara yang diciptakan secara bersama.

Dalam Undang-Undang Administrasi Negara Nomor 30 tahun 2014 pasal 10 menjelaskan bahwa terdapat delapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu: memberikan kepastian hukum, tidak berpihak, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Fondasi ini mengartikan bahwa keterbukaan (transparansi) dan kepentingan umum dapat dilihat akan adanya hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara administrasi negara terhadap masyarakat.

Didalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwasanya pemerintahan itu dijalankan guna untuk menciptakan *good governance*. Konsep ini tidak hanya ditujukan pada pemerintahan saja tetapi semua organisasi yang sudah banyak kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Garis besarnya Islam mengajarkan tentang konsep, accountability, transparency dan justice.

Accountability atau yang sering kita sebut dengan kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* yang berarti hitung. Hal ini juga telah dijelaskan dalam agama Islam bahwasanya, “*setiap apa yang diperbuat kelak akan dipertanggungjawabkan, walaupun sebesar biji zharah*” (Qs. Az-zalzalah 7-8). Dan hadits yang dinyatakan oleh Imam Bukhori dan Muslim menyebutkan,

"setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya" (Hadist Riwayat Al-Bukhori dan Muslim). Hal ini masih selaras dengan konsep *good governance* yaitu komitmen seorang pemimpin. Komitmen sangatlah dibutuhkan bagi seorang pemimpin sebab cukup berkaitan dengan keseriusan dan tanggungjawabnya dalam menjalankan amanah.

Maka dari itu informasi terhadap seluruh berjalannya pemerintahan dari institusi atau lembaga manapun harus dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Informasi yang tersedia juga harus memadai supaya mudah untuk dapat dimengerti dan dipantau oleh publik, atas dasar inilah transparansi sangat perlu kita terapkan. Dalam segi hukum transparansi dapat menjadi kontrol sosial yang terbuka untuk mengurangi kelemahan dan kekurangan mekanisme yang terjadi pada lembaga penegak hukum. Peran saling mengisi yang dilakukan masyarakat akan dapat menjamin rasa adil ditengah masyarakat itu sendiri. Dengan itu partisipasi secara langsung menjadi sangat penting sebab kita tidak dapat mengandalkan sistem perwakilan rakyat sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat. Karena itulah prinsip *Representatif In Ideas* dibedakan dari *Representation In Presence*, sebab perwakilan yang telah kita lihat belum tentu mewakili apa yang menjadi gagasan.

Dalam ajaran Islam konsep transparansi telah dipaparkan dalam Qs. Al - Baqarah ayat 282 yang berbunyi *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulislah dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang ia mengimlakkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhanya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Janganlah saksi itu enggan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisinya"*.

Di Indonesia, peran penting masyarakat untuk dapat ikut serta dalam upaya pemberantasan tindak kebengisan perilaku korupsi belum mendapatkan perhatian secara spesifik. Minimnya perhatian akan peran penting partisipasi masyarakat tersebut memberikan dampak terhadap kualitas partisipasi masyarakat Indonesia. Peran serta masyarakat telah dijelaskan dalam pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi *"Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan"*.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah kewajiban bagi seluruh masyarakat. Karena hal itu sangat mutlak menjadi hak dan kewajiban, dan masyarakat tidak menjadi

penyorak bagaimana peraturan undang-undang ditegakan. Hal ini sangat jelas bahwa peran penting partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa adil sebagai upaya dalam memberantasan tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan keadilan hal ini merujuk kepada keadilan sosial. Maka sudah seharusnya lembaga negara menentukan kebijakannya dengan menerapkan prinsip keadilan, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirinya ditindas oleh penguasa. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah untuk menempatkan sesuatu dengan tepat. Terdapat salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadilan yang berbunyi, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbutan keji, kemungkaran dan permusuhan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"*, (Qs. An-Nahl Ayat 90).

Dengan ayat ini telah dijelaskan bagaimana hubungan sosial kaum mukmin dan manusia di dunia dilandaskan kepada prinsip kebaikan, keadilan dan menjauhi dari segala perbuatan zalim. Adil dan keadilan adalah landasan bagi ajaran dan syariat agama Islam dan Allah SWT tidak pernah berbuat zalim terhadap orang lain dengan menginjak hak orang lain.

Kehadiran KPK sebagai lembaga *superbody* pada dasarnya telah memberikan nafas baru bagi penindak tindak pidana korupsi. Kewenangan lebih yang telah diberikan menjadikan ia terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Salah satu tujuan dibentuknya KPK ialah tidak lain untuk membantu kejaksan dan kepolisian dalam meningkatkan upaya memberantas perilaku korupsi. Salah satu yang menjadi kewenangan lembaga KPK adalah memeriksa pejabat negara baik anggota legislatif, eksekutif atau pemerintah daerah maupun pusat yang diduga melakukan korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pasal 11 menjelaskan bahwa KPK mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

Tujuh belas tahun sudah KPK berdiri terdapat beberapa hal yang harus dicermati. Pertama, apakah KPK telah mampu melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan maksimal sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang KPK No. 30 tahun 2002. Kedua, apakah KPK telah berhasil memacu lembaga penegak hukum lainnya untuk menegakan hukum.

Melihat data dari *Anti corruption Clearing House* (ACCH) KPK, Pada 31 Desember 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengurus sebanyak 3.929 perkara yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkracht, dan eksekusi. Sepanjang tahun 2018 KPK sudah menyidik 199 perkara. Jumlah angka ini meningkat 64,5 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 121 perkara. Sepanjang 14 tahun terakhir, jumlah penindakan perkara yang dilakukan KPK bersifat fluktuatif, dan cenderung meningkat.

Dapat kita ketahui di Indonesia terdapat lembaga penegak hukum kepolisian yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penegakan hukum yaitu: penyidikan dan penyelidikan, sedangkan dalam ranah penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 8 dan pasal 1 ayat 10.

Kewenangan kepolisian juga diatur pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi tetap dipunyai pihak kepolisian meskipun dilain sisi terdapat lembaga pemberantas korupsi lainya yaitu KPK.

Proses yang dilakukan oleh kepolisian terdapat *Cheks and Balences* dengan apa yang dilakukan oleh kejaksaan. Telah kita ketahui bahwasanya tugas daripada kejaksaan adalah sebagai penuntut umum yang mana hal tersebut menjadi bentuk sinergisitas antara kejaksaan dan kepolisian dalam menindaklanjuti para pelaku tindak pidana korupsi.

Tugas wewenang kejaksaan diatur pada UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dua lembaga penegak hukum tersebut saling berkaitan dalam hal pengawasan kinerja. Sehingga terdapat *Ceks and Balances* yang mana hal tersebut akan dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang.

Berbeda dengan KPK, dimana tidak ada lembaga lain yang megawasi akan kinerjanya sebab KPK adalah lembaga *power superboddy*. Hal ini cukup disayangkan karena memungkinkan akan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Minimnya informasi proses kinerja KPK terlihat saat penulis membuka website yang dimiliki oleh KPK, dimana tidak ada informasi yang berkaitan dengan proses kinerjanya.

Dalam kejaksaan transparansi terhadap publik mengenai partisipasi publik untuk mengkses informasi yang berkaitan dengan kinerjanya telah diterapkan. Hal tersebut terlihat dalam website kejaksaan yang memuat informasi kinerja didalamnya.

Rumusan Masalah

Sebagai lembaga pemberantasan korupsi KPK mempunyai sifat *Independent* dan *Superbody* sehingga tidak ada lembaga lain yang dapat mengawasi proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Untuk mengupas apa yang menjadi permasalahan KPK maka penulis akan megoptimalkan adanya media elektronik sebagai media informasi pada publik yang selama ini tidak pernah diketahui mengenai kinerja yang seharusnya sebagai salah satu upaya pengawasan masyarakat terhadap KPK.

Peranan media elektronik dalam melawan korupsi menurut ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pemerintahan yang dengan mengusung

partisipatif publik sangat berperan dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, perkembangan teknologi dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dapat digunakannya untuk pencegahan tindak pidana korupsi yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Dengan kata lain melalui elektronik tindak pidana korupsi dapat diawasi oleh publik.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi inilah KPK dituntut untuk lebih terbuka pada masyarakat sehingga publik akan dapat memantau secara langsung. Pengawasan dalam hal ini ialah melalui website yang diharapkan dapat menjadi media pengawasan masyarakat terhadap kinerja KPK. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi inilah diharapkan dapat memberi peran yang signifikan dalam hal transparansi pemberantasan perbuaatan atau korupsi yang dilakukan lembaga KPK di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Mempelajari berbagai pustaka yang menyangkut dengan penelitian penulis. Khususnya yang berkaitan dengan transparansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap publik. Dalam studi literatur ini data diperoleh dari buku-buku, jurnal penelitian, makalah, surat kabar online dan media elektronik yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan dalam penelitian ini. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat serta mempelajari data yang diperoleh dan dianggap penting sebab mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

KPK dan Korupsi di Indonesia, Asal mula kata korupsi adalah terlahir dari bahasa latin yaitu *Corruptio*. Kata ini mempunyai kata kerja *Corrumpere* yang bermakna rusak, busuk, menyogok atau memutarbalikan. Sementara itu arti korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang perusahaan, negara, atau yayasan yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu perbuatan yang melanggar hak-hak masyarakat. Sehingga hal tersebut tidak dapat kita golongkan hanya sebagai kejahatan yang biasa saja (*Ordinary Crime*) tetapi luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Karena itulah usaha pemberantasan yang dilakukan tidak hanya dijalankan secara “biasa saja” namun perlunya tindakan yang “luar biasa”.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah dasar bahkan tumbuh membudaya sehingga cukup sulit untuk diberantas. Semua ini terlihat yang mana korupsi di Indonesia semakin lama semakin menjadi luas. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga konsultan PERC menyatakan kalau Indonesia merupakan salah satu negara Asia terkorup. Gelar menjadi negara terkorup

tersebut diberikan sebab nilai Indonesia menyentuh angka 9,25 hampir penuh dari nilai 10. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2013, sejak penerapan otonomi daerah di Indonesia, ada sekitar 318 dari 530 kepala daerah tersangkut masalah hukum dimana 86% diantaranya karena kasus korupsi.

Hasil pantauan terbaru oleh ICW (Indonesia Corruption watch), rata-rata penanganan kasus korupsi pada tahun 2015-2018 di Indonesia, pertahunnya sekitar 454 perkara baru yang disidik oleh aparat penegak hukum dengan jumlah tersangka mencapai 1.087 orang dengan profesi yang berbeda-beda. Ditemukan oleh penegak hukum, jumlah nilai suap sebesar Rp 134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp 6,7 miliar dan jumlah pencucian uang sebesar Rp 91 miliar. Sehingga ketika dikalkulasikan kerugian negara mencapai sebesar Rp 5,6 triliun.

ICW (Indonesian Corruption Watch) melakukan perbandingan terhadap jalannya proses kasus korupsi selama tahun 2015 sampai tahun 2018. Hal ini guna menilik gambaran secara umum penindakan kasus perilaku korupsi yang dijalankan oleh penegak hukum menurut total kasus yang disidik, tersangka dan kerugian yang ditimbulkan bagi negara.

Grafik 1. Kasus Korupsi Selama Tiga Tahun Dengan Semester Yang Sama

Hasil laporan ICW diatas menunjukkan bahwa operasi penindakan kasus korupsi cukup menurun dilihat dari segi kasus maupun jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini berbeda dengan kerugian yang dialami negara yang mana pada tahun 2015 dan 2016 terlihat melonjak lebih besar. Meskipun demikian ada penurunan terjadi yaitu pada tahun 2017 ke 2018 terkait kerugian negara.

Selama 4 tahun dugaan korupsi yang ditangani oleh penegak hukum rata-rata sebesar 392 perkara pertahun. Sedangkan pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi rata-rata sebanyak 1.153 orang. Dengan ini kerugian yang dialami oleh negara karena korupsi rata-rata sebesar Rp 4,17 triliun. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh penegak hukum cenderung sedikit jika dihitung berdasarkan rata-rata setiap bulannya. Total penegak hukum hanya mampu menyelesaikan 33 perkara dugaan kasus korupsi dengan menetapkan 96 orang tersangka setiap bulannya. Artinya rata-rata kasus dugaan korupsi yang berhasil dapat ditindak oleh penegak hukum adalah 3 (tiga) orang tersangka korupsi.

Di Indonesia pemberantasan tindak pidana korupsi pada mulanya telah dilakukan semenjak tahun 1957 silam dan telah disusum lama beberapa lembaga hukum sebagai media yang sah berdasarkan aturan undang-undang untuk menjadi

dasar bagi proses pemberantasan korupsi. KPK adalah salah satu lembaga formal anti korupsi yang dimiliki oleh Indonesia yang didirikan sejak tahun 2002. Pembangunan lembaga anti korupsi KPK sendiri didasari oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengan dengar pendapat dan pertemuan pada instansi yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan wewenang yang dimiliki oleh KPK ini, maka tidak ada salahnya jika KPK menjadi bambu runcing dengan ujung yang tajam bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Meskipun demikian perlunya KPK untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam menegakan hukum dengan mengimplementasikan semua pasal tindak pidana korupsi yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia UU tersebut dibagi menjadi beberapa jenis korupsi yaitu korupsi yang berhubungan dengan kerugian negara, suap, kepentingan dalam pengadaan, penggelapan dalam jabatan dan pemerasan.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh KPK ialah mengambil alih kewenangan penyidikan dan penuntutan pihak kepolisian dan kejaksaan, prinsip yang digunakan oleh KPK ialah “*Tigger Mechanism*” dan “*Take Over Mechanism*”. Pengambilalihan kewenangan tersebut dapat dijalankan jika terdapat indikasi adanya “*Unwillingnes*” terhadap instansi terkait dalam menjalankan tugasnya.

Berhubungan dengan dalamnya wewenangan yang dipunyai oleh KPK daripada instansi terkait yakni kejaksaan dan kepolisian. Maka terdapat peluang terjadinya tumpang dan tindih dalam menjalankan wewenang antar tiga lembaga tersebut. Seperti halnya kasus yang pernah terjadi ketika petinggi anggota kepolisian diduga terlibat korupsi pada proyek simulator roda dua dan roda empat dalam uji Surat Izin Mengemudi (SIM). Dengan adanya kasus tersebut sebanyak 20 penyidik kepolisian ditarik dari KPK, sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan mengurangi daya kinerja dari KPK itu sendiri. KPK yang dibentuk dengan dasar untuk meningkatkan efektifitas terhadap usaha pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan badan khusus yang mempunyai wewenang yang independen, luas dan bebas dari kekuasaan manapun.

Kesenjangan wewenang antara KPK dengan penegak hukum lainnya dan tanpa pengawasan pada kinerja yang dilakukan merupakan faktor dari salah satu penyebab kekurangan KPK. Disisi lain peran KPK selaku lembaga yang bersifat *superbody* institusi penegak hukum pada kejahatan korupsi dirasa terdapat akan kesan tebang pilih.

Transparansi Publik, Keresahan masyarakat terhadap penanganan korupsi yang diskriminatif sepertinya sudah sulit untuk diatasi. Ditambah ketika terkuak perlakuan istimewa terhadap koruptor pada masa tahanan. Seperti berita yang baru-baru ini. Dilansir oleh media online Merdeka.com, diketahui bahwa Setya Novanto, pelaku korupsi E-KTP sedang berjalan-jalan bersama istrinya di toko furniture kawasan Pandalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dugaan ini berdasarkan pernyataan kepala Divisi Permasyarakatan Kemenkumham, Jabal Abdul Aris. Bagaimana mungkin seorang koruptor bisa keluar masuk penjara hanya dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Hal inilah yang membuat masyarakat geram, seorang napi narapidana koruptor memperoleh kenyamanan dan fasilitas mewah.

Berkaitan dengan penumpasan perilaku tindak pidana korupsi yang sudah diimplementasikan di negara Indonesia, dapat dilihat bahwasanya apa yang telah dilakukan lebih condong parsial dan tidak mempunyai skema dan strategi yang jelas. Salah satu kemungkinan yang menjadi gagalnya suatu program penanganan korupsi dalam mencapai tujuannya yaitu peran masyarakat dalam mengawasi serta memperkuat akuntabilitas publik.

Konsep *Good Governance* terjalin erat dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sebagai norma pemerintah *Good Governance* adalah sasaran yang hendak dituju sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik. Dan AAUPB sebagai norma yang pengikat merupakan rambu menuju *Good Governance*. Membangun hubungan antara AAUPB dan *Good Governance* dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. S.F. Marbun mengutip pendapat dari Robert Hass, menemukan lima indikator yang dapat disebut sebagai *Good Governance*, yaitu:

1. Menjalankan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Publik berpartisipasi saat pengambilan keputusan politik.
3. Menjalankan aturan guna menjaga harapan masyarakat.
4. Menumbuhkan ekonomi pasar dengan dasar tanggung jawab kepada publik.
5. Tujuan politik pemerintah yang mengarah pada pembangunan.

Sepanjang otoritas masih terkonsentrasi hanya terhadap golongan tertentu ditambah tiadanya cara kontrol dan komitmen kepada masyarakat yang jelas maka peluang perilaku korupsi masih terbuka sangat lebar, layanan sipil yang melanjai dan bertele-tele, ketidakjelasan standar pelayanan (SOP) dan sistem *public complain* (Robert Kligoar, 2005 : 3). Peluang untuk berbuat korup di wilayah kekuasaan tentu terus ada, apalagi UU memberikan kewewenangan yang bebas terhadap pejabat guna memberikan Interpretasi kepada peraturan perundang-undangan tertentu.

Peran dan fungsi media massa sebagai alat kontrol kepada sistem peradilan pidana bertujuan sebagai alat untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Fungsi pers sebagai kontrol sosial sangat

penting sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun akan penyimpangan dan penyelewengan lainnya.

Pemanfaatan Media, Pentingnya peran partisipasi masyarakat pada transparansi kinerja publik dalam memberantas korupsi. Sebagai lembaga negara Indonesia, KPK seharusnya berkewajiban untuk membuka jalan masuk informasi yang berkaitan dengan kinerja terhadap masyarakat luas. Melalui prosedur untuk melaksanakan prinsip keterbukaan akan tercipta tata kelola lembaga yang terbuka. Dengan seperti itu secara luas publik akan dapat mengawasi kinerja dari KPK dan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mewujudkan *Good Governance*.

Transparansi sendiri merupakan keterbukaan atas segenap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun instansi. Keterbukaan yang dimaksud disini ialah keterbukaan diri berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif berkaitan dengan proses penyelenggaraan negara yang tetap memperlihatkan perlindungan atas rahasia negara dan hak asasi individu. Salah satu manfaat penting dengan adanya transparansi ini yaitu bagaimana masyarakat dapat mengukur kinerja KPK dalam memberantas pelaku tindak pidana korupsi.

Pada era globalisasi transparansi informasi yang dilakukan untuk masyarakat mempunyai peran yang sangat penting bagi setiap orang. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu momen guna mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan dasar hukum kepada hak individu untuk mendapatkan informasi terkait publik. Sehingga badan publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat. Salah satu manfaat dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini yaitu terjaminnya hak asasi warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan.

Selain itu untuk menghasilkan informasi yang berkualitas perlunya badan publik meningkatkan tata kelola dan layanan informasi yang nantinya dapat mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sehingga hal ini akan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien dan akuntabel.

Saat ini akses akan segala Informasi dapat didapatkan dengan mudah oleh masyarakat. Penyebaran informasi yang tidak terbatas dari biaya maupun jarak. Era sekarang kehidupan semakin mudah, sehari-hari masyarakat kadang kalanya mendapatkan informasi yang sepele hingga serius. Keterbukaan informasi menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Setiap badan pemerintahan atau badan publik dari berbagai tingkatan memiliki kewajiban dalam melakukan pelayanan publik yang baik untuk membangun pemerintahan yang baik.

Partisipasi Publik Dalam Penanganan Tipikor Melalui Pemanfaatan Media, Pada tahun 2004 hingga 2018 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah

melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan rincian 1.135 penyelidikan, 887 penyidikan dan 719 penuntutan. Di sisi lain KPK juga telah mengeksekusi sebanyak 610 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus diatas masih minim untuk diketahui masyarakat akan siapa dan berapa jumlah orang yang melakukan banding di pengadilan tinggi dan pengajuan kasasi di Mahkamah Agung. Perlunya penegak hukum dalam hal ini adalah KPK untuk membuka informasi dan melibatkan publik ikut turut serta dalam upaya berlangsungnya penegkan hukum. Karena selama ini KPK tidak transparan dalam mengawal jalanya putusan peradilan. Sehingga publik tidak dapat mengakses dan mengawal kasus yang telah dituntut oleh KPK. Hal ini dapat memberikan dampak buruk terhadap persepsi masyarakat pada kinerja KPK dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana korupsi. Maka dari itu dibutuhkan media elektronik sebagai penghubung informasi antara KPK dengan masyarakat.

Media elektronik dibangun pada waktu informasi yang luas dan cepat sehingga dengan hal ini membuat kontruksi sosial berjalan merata dan cepat. Wujud realita yang terbentuk saat ini dapat membentuk opini massa yang cenderung beranggapan rendah. Mengingat fakta dan sifat media massa adalah menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi maka seharusnya media massa membangun gambaran realita sebenarnya.

Adanya website sebagai salah satu media elektronik masa kini yang baik dapat memberikan informasi publik. Menurut Puntodi dalam sifat yang viral berarti seperti virus yang menyebar cepat. Hal ini dimaksudkan berkaitan dengan informasi publik di KPK yang hanya memuat penuntutan, untuk ditambahkan muatan-muatan adanya informasi jalanya proses suatu kasus. Maksudnya yakni informasi proses sudah sampai manakah ketika penuntutan KPK diajukan kepada pihak peradilan negeri pada tingkat pertama, Peradilan Tinggi pada tingkat kedua dan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai tingkat ketiga.

Solusi dalam masalah ini ialah memberikan informasi pada publik. Sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi berkaitan dengan penanganan-penanganan kasus yang selaras dengan pemberangusan pidana korupsi. Misalnya, pada kasus tindak pidana korupsi massal yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. KPK pada awalnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada mantan Moch Arief Wicaksono, Ketua DPRD dan Jarot Edy Sulistyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang. Dalam kasus tersebut Arief mendapat suap sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta) dari Edy guna membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Namun ketika petugas melakukan pengembangan perkara penyidik ditemukan bahwa terjadi suap dilakukan oleh belasan anggota dewan.

Setelah itu KPK memberikan 18 berkas bersama bukti kasus terkait suap pembahasan APBD Pemerintahan Kota Malang ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam kasus ini Arief Wicaksono sebagai terdakwa divonis lima tahun penjara.

Jika seandainya dalam putusan tersebut dirasa keberatan maka ia akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Setelah pengajuan banding hakim memutuskan diterima. Karena tidak ada kesalahan atau pelanggaran peraturan lain maka hakim tidak merubah putusan vonis. Jika dirasa masih tidak adil maka terdakwa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Contoh kasus diatas memberikan gambaran terhadap transparansi KPK yang seharusnya tetap mengawal jalanya putusan dari setiap pengadilan baik proses dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung. Penyampaian berkas tuntutan pada peradilan negeri Surabaya, KPK harus menginformasikan pada publik terkait tahapan-tahapan terdakwa dalam penuntutan KPK.

PROSES PERKARA

No.	Tersangka	Kasus	Penyelidikan	Penyidikan	Pra Peradilan	Penuntutan	Putusan (PN)	Banding	Putusan (PTN)	Kasasi	Putusan (MA)
1.	Arief Wicaksono	Suap dalam korupsi massal DPRD kota Malang.
			Tanggal Penyelidikan	Tanggal Penyidikan		Tanggal Penuntutan	Tanggal Putusan	-	-	-	-
2.	Karen Agustiawan	Korupsi blok Basker Matta Gummy di Australia.
			Tanggal Penyelidikan	Tanggal Penyidikan		Tanggal Penuntutan	Tanggal Putusan	Tanggal Banding	Tanggal Putusan	-	-
3.	Imam Nahrawi	Suap dana hibah KONI.
			Tanggal Penyelidikan	Tanggal Penyidikan		-	-	-	-	-	-

Arti Simbol.

Proses jalanya kasus yang telah dilalui.
Selasainya suatu kasus.
Menunggu waktu jalanya proses suatu kasus.
Proses kasus yang masih berlangsung
Proses yang tidak dilewati oleh suatu kasus.
Proses yang tidak dilalui

Selain korupsi massal DPRD Kota Malang, penulis juga menampilkan contoh kasus yang dialami oleh Karen Agustiawan dan Imam Nahrawi. Dimana Karen Agustiawan terkena kasus korupsi terhadap blok Basker Matta Gummy (BMG) dan divonis 8 tahun penjara serta membayar denda sebesar 1 Miliar rupiah dengan subsider 4 bulan kurungan. Hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang memvonis Karen hingga 15 tahun penjara. Namun hakim anggota, Anwar memberikan pendapat yang berbeda bahwasanya dalam hal ini Karen tidak terbukti bersalah. Dengan keputusan yang dianggap tidak sesuai maka ia mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Sedangkan Imam Nahrawi terkena kasus suap dana hibah kemenpora yang kini masih dalam tahap penyidikan.

Disini penulis memberikan contoh gambaran transparansi kinerja KPK melalui website yang seharusnya mempublish perjalanan kasus dari ditetapkannya tersangka hingga putusan akhir. Didalam website tersebut berisi kolom mulai dari tersangka, kasus, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi jika melakukan banding dan putusan mahkamah agung jika melakukan kasasi. Di setiap kolom, penulis mencantumkan kolom tanggal dibawahnya. Hal ini berguna untuk melihat berapa lama KPK menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Jika putusan tersebut telah *final*, maka hasilnya wajib disambungkan dengan website yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Dengan konsep inilah proses penanganan suatu kasus yang ditangani KPK dapat diawasi secara detail oleh publik.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah kami paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan salah satu masalah besar bagi indonesia. Dalam hal ini dibutuhkan banyak dukungan dari kalangan penegak hukum yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga dari seluruh tingkatan masyarakat demi mewujudkan Indoneia bebas korupsi. Partisipasi publik merupakan salah satu terobosan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan itu KPK perlu menerapkan transparansi informasi terhadap proses jalanya kasus tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan media elektronik. Dengan hal ini masyarakat akan turut serta dalam pengawalan penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Alamsah, W. 2018, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018", Indonesia Corruption Watch.
- Asshidiqie, Jimly, dalam makalahnya yang berjudul "*Gagasan Negara Hukum*".
- Azhar, M 2015, "Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem penyelenggaraan Administrasi negara", *Notarius*, ISSN: 2086-1702.
- Badjuri, A 2011, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia," *Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18.
- Budiyono, 2013 "Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi", *Prespektif*, Vol. 18.
- Bungin, B 2008, "Kontruksi sosial media massa", *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Dwiputrianti, S 2009, "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Ilmu Administrasi*, Vol. 6.
- Fitriani, Y 2017, "Analisa Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat", *Paradigma*, Vol. 19, No. 2.
- Husodo, AT 2011, "Save KPK Save Indonesia", *Indonesia Corruption watch*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kligoard, R 2005, "Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah", *Jakarta, Yayasan Obor Indonesia*.
- Kurniawan, T 2009, "Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan", *Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16.
- Marbun, S. F 2014, "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak", *Yogyakarta, FH UII Press*.
- Maryanto, 2012, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Civis*, Vol. 2.
- Mas, M, "Efektifitas Pelaksanaan Kewenangan Superbody Komisi Pemberantasan Korupsi". *Fakultas Hukum Universitas Makasar*.
- Nugroho, F. H. E 2014, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik", *Dinamika Hukum*, Vol. 14.
- Sa'adah, B 2015, "Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government", *ISSN 2303-341X*, Vol. 3.
- Saputra, A 2018, "Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintahan daerah serta Potensi Whisterblowing Atas Penyalahgunaan Dana", *Ilmiah Wahana Akuntansi*, Vol. 13.

Saragih, Y. M 2018, “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5.

Sari, T. P 2019, “E-Government: Teknologi Melawan Korupsi”, *Teknologi Informasi ESIT*, Vol. 14.

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 10

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 11

Internet

Abdul Basith Ramadhan, 2017, Good Governance Dalam Islam”, *Jmf.Fisipol.ugm.ac.id*, <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 24 September 2019.

Anonim, 2018, “Penindakan”, *ACCH*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses pada tanggal 17 juli 2019.

Djohan, D 2013, “Kemdagri: 310 dari 530 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi”, *Suara Pembaruan*, <http://sp.beritasatu.com/home/kemdagri-310-dari-530-kepala-daerah-tersangkut-kasus-hukum/45113>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

Hariyanto, I., *Detik*, “KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Tersangka Baru Kasus Koni”, <https://news.detik.com/berita/d-4711661/kpk-tetapkan-menpora-imam-nahrawi-tersangka-baru-kasus-koni>, diakses pada tanggal 14 oktober 2019.

Rahma, A., *Tempo*, “Karen Agustawan divonis 8 Tahun Bui Jaksa Menimbang Banding”, , <https://nasional.tempo.co/read/1213804/karen-agustiawan-divonis-8-tahun-bui-jaksa-menimbang-banding>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.

Rahma, A., *Tempo*, “Kejaksaan Agung Ajukan Banding Atas Vonis Karen Agustawan”, <https://nasional.tempo.co/read/1214775/kejaksaan-agung-ajukan-banding-atas-vonis-karen-agustiawan/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 oktober 2019.

Ramadhan, D. I 2019, “Kemenkumham: Setya Novanto Bersama Istri ke RS Sebelum Plesiran” *detiknews*, m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4587166/kemenkumham-setya-novanto-bersama-istri-di-rs-sebelum-plesiran, diakses pada tanggal 17 juli 2019.

- Roosyana, R 2019, “KPK Mesti Fokus Benahi SDM”, *Beritagar.id*, <https://www.google.com/amp/s/beritagar.id/tren/artikel-amp/berita/kpk-mesti-fokus-benahi-sdm>, diakses pada hari selasa 7 feb 2019.
- Roosyana, R 2019, “Aparat Dinilai Minim Terapkan Pasal Pencucian uang”, *Beritagar.id* , <https://beritagar.id/artikel-amp/berita/aparat-dinilai-minim-terapkan-pasal-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 5 juli 2019, diakses pada tanggal 5 juli 2019.